



BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 88 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 63 TAHUN 2022 TENTANG
RENCANA KERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 63 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2023;
- b. bahwa sehubungan adanya perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, maka Peraturan Bupati Garut sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 63 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);

26. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 228 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 228);
27. Peraturan Bupati Garut Nomor 63 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 63);
28. Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 63 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN TAHUN 2023.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Garut Nomor 63 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 63) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 1 - 9 - 2023

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

Diundangkan di Garut
pada tanggal 1 - 9 - 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

NURDIN YANA

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2023 NOMOR 88

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 88 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI GARUT NOMOR 63
TAHUN 2022 TENTANG
RENCANA KERJA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN TAHUN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang di tempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat atau sektor swasta lainnya. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan penjabaran tahun ke empat dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 yang penyusunannya harus selaras dan konsisten dengan prioritas, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah. RKPD Tahun 2023 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023. Berdasarkan Pasal 243 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, bahwa Perubahan RKPD dan Perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih dan atau kurang tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Berdasarkan pasal 343 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Perubahan RKPD meliputi Perubahan :

- a. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah;
- b. Target sasaran pembangunan daerah;
- c. Prioritas pembangunan daerah;
- d. Penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan Perangkat daerah; dan
- e. Target kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan Tema Pembangunan “Peningkatan Pelayanan Publik, Pemerataan Pembangunan dan Daya Saing Daerah serta Penguatan Demokrasi untuk Kesejahteraan Masyarakat” telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD selanjutnya dijadikan dasar penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah dan menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara untuk penyusunan Perubahan APBD. Bagi Perangkat Daerah Kabupaten Garut, RKPD merupakan pedoman untuk menyempurnakan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) dan penyusunan RKA Perangkat Daerah Tahun 2023.

Muatan perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 agar perlu memperhatikan diantaranya Program dan Kegiatan yang diperlukan serta memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan yang menjadi prioritas di tahun 2023, Kemampuan keuangan Daerah melalui APBD, mengakomodir pendanaan DAK dan APBD Provinsi, memuat target kinerja yang sudah ditetapkan pada Perubahan Renstra diantaranya Program prioritas, program unggulan, program mendesak dan SPM. Perencanaan perubahan difokuskan pada pergeseran pagu kegiatan, sub kegiatan dan kode rekening belanja, perubahan target kinerja, pagu kegiatan serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja adalah

sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan

- Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 7);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang

- Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);
 31. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 228 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 228);
 32. Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 36);
 33. Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 36).

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ini

disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar PD yang sesuai dengan RKPD serta mewujudkan pencapaian target dan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah. Guna menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, maka perlu dilakukan perubahan Renja PD Tahun 2023.

2. Tujuan

Adapun tujuan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2023, yaitu :

- a. Mewujudkan konsistensi antara capaian tujuan Renstra dengan tujuan perencanaan dan penganggaran Tahunan.
- b. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan.
- c. Menjadi pedoman pengendalian program dan kegiatan Prioritas tahun 2023.
- d. Sebagai bahan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan kegiatan perangkat Daerah

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENCANA KERJA PD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dan Capaian Renstra
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

2.4 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada Bab ini memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pemerintahan Daerah serta Prioritas Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2023 yang diselaraskan dengan tugas dan fungsi, Tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah serta Program, Kegiatan dan Sub kegiatan, lokasi serta sasaran perubahan kelompok penerima manfaat, dan pagu perubahan renja tahun 2023.

3.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Sebelum dan Sesudah Perubahan

3.2 Perubahan Rencana Kerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Semula dan Menjadi

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dan Capaian Renstra

Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan rencana pembangunan pada prinsipnya dilakukan untuk mengukur capaian target kinerja dan daya serap anggaran. Evaluasi Rencana Kerja dilakukan untuk mengetahui hasil pelaksanaan Renstra dan RKPD, berdasarkan pagu dan realisasi Renstra serta RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, serta rata-rata capaian Renstra sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dan rata-rata capaian Renja pada Triwulan II Tahun 2023.

Konsistensi RKPD dan APBD akan berdampak pada jumlah realisasi anggaran. Program/kegiatan yang tidak tercantum dalam RKPD tidak menjadi capaian RKPD atau Renja. Oleh karena itu, apabila masih ada inkonsistensi program/kegiatan antara perencanaan dan penganggaran, maka realisasi anggaran dokumen rencana akan menjadi tidak sama dengan jumlah realisasi dokumen anggaran. Untuk mengetahui informasi dimaksud, juga dimuat persandingan antara realisasi anggaran RKPD dan APBD.

Selengkapnya hasil evaluasi rencana strategis dan rencana tahunan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Garut Tahun 2023 disajikan sebagai berikut:

2.1.1. Realisasi Anggaran Program Renstra

Realisasi anggaran Renstra merupakan akumulasi realisasi anggaran tahunan dalam Renja. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemantauan dan supervisi untuk memastikan bahwa visi dan misi RPJMD dapat diwujudkan. Realisasi anggaran Renstra Kabupaten Garut sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perbandingan Pagu Indikatif dan Realisasi Anggaran Program
Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Garut Tahun
2019-2024
Sampai Triwulan II Tahun 2023

URUSAN DAN PROGRAM	PAGU INDIKATIF RENSTRA TAHUN 2023	% REALISASI RENSTRA TAHUN 2023	REALISASI APBD TW II TAHUN 2023
2	5	7	6
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	11.112.659.443,00	50,70	5.633.657.495,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	11.112.659.443,00	50,70	5.633.657.495,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.432.072.133,00	50,73	3.770.022.210,00
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	216.480.000,00	37,99	82.240.400,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.000.000,00	74,97	22.491.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	23.800.000,00	100,00	23.800.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	17.000.000,00	50,00	8.499.800,00
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	17.400.000,00	50,00	8.699.800,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.000.000,00	50,00	7.499.800,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.000.000,00	75,00	11.250.000,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	98.280.000,00	0,00	-
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.615.351.143,00	44,61	2.504.837.809,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.615.351.143,00	44,61	2.504.837.809,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	150.000.000,00	26,66	39.983.777,00
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	150.000.000,00	26,66	39.983.777,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	27.768.000,00	100,00	27.768.000,00
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya	27.768.000,00	100,00	27.768.000,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	504.936.590,00	83,87	423.497.445,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.295.300,00	50,00	5.147.650,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	199.736.240,00	86,95	173.679.545,00

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.382.050,00	100,00	11.382.050,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	195.511.800,00	99,92	195.346.200,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	23.248.200,00	40,70	9.462.000,00
Fasilitasi Kunjungan Tamu	24.123.000,00	49,91	12.040.000,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40.640.000,00	40,45	16.440.000,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	400.000.000,00	96,47	385.867.516,00
Pengadaan Mebel	200.000.000,00	98,93	197.867.516,00
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200.000.000,00	94,00	188.000.000,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	267.907.500,00	35,85	96.038.783,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	84.416.400,00	26,25	22.156.108,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	183.491.100,00	40,26	73.882.675,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	249.628.900,00	84,04	209.788.480,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30.429.200,00	50,00	15.214.600,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	30.104.500,00	26,25	7.902.500,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	189.095.200,00	98,72	186.671.380,00
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.553.024.750,00	54,46	1.390.287.670,00
Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.976.817.550,00	55,55	1.098.111.170,00
Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	220.938.400,00	99,61	220.067.900,00
Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	519.924.750,00	78,51	408.200.000,00
Pengembangan Bahan Pustaka	885.954.400,00	20,96	185.719.650,00
Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	350.000.000,00	81,18	284.123.620,00
Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	576.207.200,00	50,71	292.176.500,00
Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	274.470.000,00	19,82	54.407.800,00
Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	301.737.200,00	78,80	237.768.700,00
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	330.495.960,00	29,86	98.672.000,00
Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	120.964.600,00	79,02	95.592.000,00

Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	120.964.600,00	79,02	95.592.000,00
Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	209.531.360,00		3.080.000,00
Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	111.193.360,00		-
Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	98.338.000,00		3.080.000,00
KEARSIPAN	459.175.200,00	44,59	204.754.245,00
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	459.175.200,00	44,59	204.754.245,00
Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	313.875.500,00	36,45	114.397.555,00
Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	182.711.000,00	0,00	-
Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	131.164.500,00	87,22	114.397.555,00
Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	145.299.700,00		90.356.690,00
Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	145.299.700,00	62,19	90.356.690,00
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	337.891.400,00	50,29	169.921.370,00
Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	151.155.500,00	51,01	77.102.750,00
Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	151.155.500,00	51,01	77.102.750,00
Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	186.735.900,00		92.818.620,00
Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	186.735.900,00	49,71	92.818.620,00
	11.112.659.443,00	50,70	5.633.657.495,00

Sumber : Perubahan RENSTRA DISPUSIP Tahun 2019-2024 dan pengolahan data LRA APBD 2023

Dari tabel diatas, menggambarkan perbandingan pagu indikatif Renstra Tahun 2023 terhadap realisasi APBD TA. 2023, dari total pagu indikatif Renstra Tahun 2023 sebesar Rp. 11.112.659.443,00, melalui program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam Renja Tahun 2022 dalam pelaksanaannya pada APBD TA. 2023, sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.870.308.065.290,00 atau sebesar 50,70%.

2.1.2. Tingkat Capaian Kinerja Program RENSTRA

Capaian Renstra merupakan hasil pelaksanaan Renja setiap tahun. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemantauan dan supervisi untuk memastikan rencana program RENSTRA dapat diwujudkan. Berdasarkan data hasil evaluasi Renja Tahun 2023, diperoleh rata-rata tingkat capaian RENSTRA s.d. Triwulan II Tahun 2023 adalah 50,70% untuk target kinerja dan 50% untuk target anggaran.

Tabel 2.2
Rata-Rata Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Program
RENSTRA Kabupaten Garut Tahun 2019-2024
Sampai Triwulan II Tahun 2023

URUSAN DAN PROGRAM	Rata-rata Tingkat Capaian RENSTRA s/d Tahun 2023 (%)	
	KINERJA %	Realisasi Anggaran (%)
2	5	7
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	50,00	50,70
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	50,00	50,70
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	50,00	50,73
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50,00	37,99
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50,00	74,97
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	50,00	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	50,00	50,00
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	50,00	50,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	50,00	50,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	50,00	75,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0,00	0,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	50,00	44,61
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	50,00	44,61
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	50,00	26,66
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	50,00	26,66
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100,00	100,00
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya	100,00	100,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	83,87	83,87
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	50,00	50,00

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50,00	86,95
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	50,00	100,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50,00	99,92
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	50,00	40,70
Fasilitasi Kunjungan Tamu	50,00	49,91
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50,00	40,45
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	96,47
Pengadaan Mebel	100,00	98,93
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100,00	94,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50,00	35,85
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50,00	26,25
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	50,00	40,26
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50,00	84,04
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50,00	50,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50,00	26,25
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	98,72	98,72
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	54,46	54,46
Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	55,55	55,55
Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	99,61	99,61
Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	78,51	78,51
Pengembangan Bahan Pustaka	20,96	20,96
Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	81,18	81,18
Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50,71	50,71
Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	19,82	19,82
Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	78,80	78,80
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	29,86	29,86
Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	79,02	79,02
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	79,02	79,02

Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	50,00	60,00
Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	50,00	60,00
KEARSIPAN	44,59	44,59
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	44,59	44,59
Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	36,45	36,45
Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	0,00	0,00
Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	50,00	87,22
Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota		
Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	50,00	62,19
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	50,29	50,29
Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	50,00	51,01
Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	50,00	51,01
Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang		
Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	50,00	49,71
	50,00	50,70 %

Sumber : PERUBAHAN RENSTRA Tahun 2019-2024 dan pengolahan data LRA APBD 2023

2.2 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023

2.2.1. Realisasi Anggaran Program Renja

Realisasi anggaran program Renja merupakan akumulasi realisasi anggaran seluruh kegiatan yang ada dalam Renja. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemantauan dan supervisi untuk memastikan bahwa target dan anggaran Renja dilaksanakan dalam rangka mewujudkan program dalam Renstra. Realisasi anggaran Renja Tahun 2023 sampai Triwulan II adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3

**Perbandingan Pagu Indikatif dan Realisasi Anggaran
RENJA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Garut Tahun
2023
Sampai Triwulan II Tahun 2023**

Nama Urusan Dan Program	Target Kinerja Dan Anggaran Renja Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)	% Realisasi Thd Renstra	Realisasi Anggaran Renja Yang Dievaluasi (2023)
-------------------------	-------------------------------------------------------------------------	-------------------------	-------------------------------------------------

	2	3	4
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	11.112.659.443,00	50,70	5.633.657.495,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	11.112.659.443,00	50,70	5.633.657.495,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.432.072.133,00	50,73	3.770.022.210,00
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	216.480.000,00	37,99	82.240.400,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.000.000,00	74,97	22.491.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	23.800.000,00	100,00	23.800.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	17.000.000,00	50,00	8.499.800,00
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	17.400.000,00	50,00	8.699.800,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.000.000,00	50,00	7.499.800,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.000.000,00	75,00	11.250.000,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	98.280.000,00	0,00	-
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.615.351.143,00	44,61	2.504.837.809,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.615.351.143,00	44,61	2.504.837.809,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	150.000.000,00	26,66	39.983.777,00
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	150.000.000,00	26,66	39.983.777,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	27.768.000,00	100,00	27.768.000,00
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya	27.768.000,00	100,00	27.768.000,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	504.936.590,00	83,87	423.497.445,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.295.300,00	50,00	5.147.650,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	199.736.240,00	86,95	173.679.545,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.382.050,00	100,00	11.382.050,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	195.511.800,00	99,92	195.346.200,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	23.248.200,00	40,70	9.462.000,00
Fasilitas Kunjungan Tamu	24.123.000,00	49,91	12.040.000,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40.640.000,00	40,45	16.440.000,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	400.000.000,00	96,47	385.867.516,00
Pengadaan Mebel	200.000.000,00	98,93	197.867.516,00
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200.000.000,00	94,00	188.000.000,00

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	267.907.500,00	35,85	96.038.783,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	84.416.400,00	26,25	22.156.108,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	183.491.100,00	40,26	73.882.675,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	249.628.900,00	84,04	209.788.480,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30.429.200,00	50,00	15.214.600,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	30.104.500,00	26,25	7.902.500,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	189.095.200,00	98,72	186.671.380,00
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.553.024.750,00	54,46	1.390.287.670,00
Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.976.817.550,00	55,55	1.098.111.170,00
Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	220.938.400,00	99,61	220.067.900,00
Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	519.924.750,00	78,51	408.200.000,00
Pengembangan Bahan Pustaka	885.954.400,00	20,96	185.719.650,00
Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	350.000.000,00	81,18	284.123.620,00
Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	576.207.200,00	50,71	292.176.500,00
Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	274.470.000,00	19,82	54.407.800,00
Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	301.737.200,00	78,80	237.768.700,00
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	330.495.960,00	29,86	98.672.000,00
Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	120.964.600,00	79,02	95.592.000,00
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	120.964.600,00	79,02	95.592.000,00
Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	209.531.360,00		3.080.000,00
Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	111.193.360,00		-
Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	98.338.000,00		3.080.000,00
KEARSIPAN	459.175.200,00	44,59	204.754.245,00
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	459.175.200,00	44,59	204.754.245,00
Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	313.875.500,00	36,45	114.397.555,00
Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	182.711.000,00	0,00	-

Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	131.164.500,00	87,22	114.397.555,00
Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	145.299.700,00		90.356.690,00
Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	145.299.700,00	62,19	90.356.690,00
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	337.891.400,00	50,29	169.921.370,00
Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	151.155.500,00	51,01	77.102.750,00
Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	151.155.500,00	51,01	77.102.750,00
Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	186.735.900,00		92.818.620,00
Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	186.735.900,00	49,71	92.818.620,00
	11.112.659.443,00	50,70	5.633.657.495,00

Sumber : RKPD Tahun 2023 dan pengolahan data LRA APBD 2023

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh informasi bahwa secara rata-rata, realisasi anggaran Renja pada Triwulan II Tahun 2023 berdasarkan bidang urusan pemerintahan adalah 50.70%. Realisasi Renja sangat dipengaruhi oleh konsistensi kegiatan antara RKPD dengan APBD. Apabila suatu kegiatan dilaksanakan berdasarkan APBD namun kegiatan tersebut tidak ada dalam RKPD, maka realisasi kegiatan tersebut tidak mempengaruhi realisasi RKPD.

2.2.2. Tingkat Capaian Kinerja Program RENJA

Tingkat capaian RENJA diperoleh dari rata-rata realisasi target kinerja dan anggaran seluruh program. Capaian program diperoleh dari rata-rata realisasi target kinerja dan target anggaran dari seluruh kegiatan pada suatu program.

Berdasarkan data pada RENJA Tahun 2023, capaian rata-rata RENJA Kabupaten Garut pada Triwulan II Tahun 2023 adalah 50.70% untuk target kinerja, dan 50.00% untuk target anggaran. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa kendala teknis yang terjadi dalam proses pelaksanaan kegiatan termasuk pengadaan barang dan jasa yang sudah proses masih rendah. Apabila dilihat berdasarkan pelaksanaan bidang urusan, maka rata-rata capaian RENJA dimaksud adalah:

Tabel 2.4

Rata-Rata Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Program Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Garut Tahun 2023

Sampai Triwulan II Tahun 2023

URUSAN DAN PROGRAM	Rata-rata Tingkat Capaian Renja Tahun 2023 (%)
---------------------------	-------------------------------------------------------

	KINERJA %	Realisasi Anggaran (%)
1	2	3
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	50,00	50,70
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	50,00	50,70
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	50,00	50,73
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50,00	37,99
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50,00	74,97
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	50,00	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	50,00	50,00
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	50,00	50,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	50,00	50,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	50,00	75,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0,00	0,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	50,00	44,61
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	50,00	44,61
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	50,00	26,66
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	50,00	26,66
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100,00	100,00
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya	100,00	100,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	83,87	83,87
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	50,00	50,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50,00	86,95
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	50,00	100,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50,00	99,92
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	50,00	40,70
Fasilitasi Kunjungan Tamu	50,00	49,91
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50,00	40,45
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100,00	96,47
Pengadaan Mebel	100,00	98,93

Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100,00	94,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50,00	35,85
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50,00	26,25
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	50,00	40,26
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50,00	84,04
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50,00	50,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50,00	26,25
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	98,72	98,72
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	54,46	54,46
Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	55,55	55,55
Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	99,61	99,61
Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	78,51	78,51
Pengembangan Bahan Pustaka	20,96	20,96
Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	81,18	81,18
Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50,71	50,71
Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	19,82	19,82
Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	78,80	78,80
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	29,86	29,86
Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	79,02	79,02
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	79,02	79,02
Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	50,00	60,00
Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	50,00	60,00
KEARSIPAN	44,59	44,59
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	44,59	44,59
Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	36,45	36,45
Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	0,00	0,00

Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	50.00	87,22
Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota		
Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	50,00	62,19
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	50,29	50,29
Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	50,00	51,01
Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	50,00	51,01
Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang		
Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	50,00	49,71
	50.00	50.70 %

Sumber : Renja Tahun 2023 dan pengolahan data LRA APBD TA. 2023

Tabel 2. 5 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Garut Sampai dengan Tahun 2023

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Garut

Kode Rekening	Usuran/ Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja SKPD tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=7:6)	(9)	(10=5 + 7 + 9)	(11=10:4)
2 17 01 2 17	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH									
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan (Dokumen)								
2 23 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	Dokumen Perencanaan SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100	4 Dokumen	4 Dokumen	100
2 23 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100

2	23	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	Jumlah Dokumen Perubahan RKA_SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
2	23	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
2	23	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
2	23	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	Jumlah Dokumen Lapran Capaian Kinerja	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
2	23	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perangkat daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 okumen	1 Dokumen	50%	2 Dokumen	1 Dokuen	50%
2	23	01	2.01	06	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	Jumlah Dokumen perencanaan SKPD	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100	6 Dokumen	6 Dokumen	100
2	23	1	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan								
2	23	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	12 Bulan	100
2	23	1	2		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Tenaga Keamanan								
2	23	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Jasa keamanan kantor/dinas	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	12 Bulan	100
2	23	1	2		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pakaian Dinas								
2	23	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas	60 Stel	60 Stel	60 Stel	60 Stel	100	60 Stel	60 Stel	100
2	23	1	2		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								

2	23	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan yang tersedia	10 Komponen	10 Komponen	10 Komponen	10 Komponen	100	10 Komponen	10 Komponen	100
2	23	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor dan Alat Tulis Kantor	15 Jenis	15 Jenis	15 Jenis	15 Jenis	100	15 Jenis	15 Jenis	100
2	23	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	100	6 Jenis	6 Jenis	100
2	23	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis cetak dan penggandaan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	100	2 Paket	2 Paket	100
2	23	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang tersedia	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	100	6 Jenis	6 Jenis	100
2	23	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia	2 Paket	1 Paket	2 Paket	1 Paket	100	2 Paket	1 Paket	100
2	23	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi ke dalam dan luar daerah yang dilaksanakan	52 Orang	50 Orang	52 Orang	50 Orang	100	52 Orang	50 Orang	100
2	23	1	2		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah								
2	23	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	100
2	23	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Meubeulair kantor yang tersedia	2 Jenis	4 Jenis	2 Jenis	4 Jenis	100	2 Jenis	4 Jenis	100
2	23	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang Baik	1 DED	1 DED	1 DED	1 DED	100	1 DED	1 DED	100
2	23	1	2		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Kantor								
2	23	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	12 Bulan	100

2	23	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Petugas dan jenis alat kebersihan kantor	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100,00	12 Bulan	12 Bulan	100
2	23	1	2		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan sarana penunjang kantor								
2	23	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas Jabatan yang terpelihara	25 unit	25 unit	25 unit	25 unit	100,00	25 unit	25 unit	100
2	23	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas Lapangan yang terpelihara	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit	100	10 unit	10 unit	100
2	23	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor yang baik	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100	1 Unit	1 Unit	100
2	23	2			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Presentase Tingkat Kunjungan Pemustaka di Perpustakaan								
2	23	2	2		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Keterpakaian Koleksi Perpustakaan								
2	23	02	2.01	06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelola Perpustakaan	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang	100	50 orang	50 orang	100
2	23	02	2.01	07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Titik Layanan Perpustakaan Keliling (Desa/ Sekolah)	200 Layanan	200 Layanan	200 Layanan	200 Layanan		200 Layanan	200 Layanan	100
2	23	02	2.01	08	Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Buku	15000 Eks	15000 Eks	15000 Eks	15000 Eks	100	15000 Eks	15000 Eks	100
2	23	02	2.01	09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Buku	3000 eks	3000 eks	3000 eks	3000 eks	100	3000 eks	3000 eks	100

2	23	2	2		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemustaka dalam satu tahun, Presentase Peningkatan Perkembangan Perpustakaan dan Budaya, Presentase Peningkatan Perkembangan Perpustakaan dan budaya baca masyarakat									
2	23	02	2.02	01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah TK/PAUD	100	100%	60 Lokus	60 Lokus	100	60 Lokus	60 Lokus		100
2	23	02	2.02	04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah	6 Perpustakaan	6 Perpustakaan	6 Perpustakaan	6 Perpustakaan	100	6 Perpustakaan	6 Perpustakaan		100
2	23	3			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Presentase Tingkat Kunjungan Pemustaka di Perpustakaan									
2	23	3	01		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota										
2	23	3	01	01	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	Prosentase Peran masyarakat dan penyimpanan , perawatan , pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	100%	100%	60 Orang	60 Orang	100	60 Orang	60 Orang		100
2	23	03	2		Pengembangan, Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya keanekaragaman koleksi naskah kuno dan koleksi etnis nusantara									
2	23	03	2.02	01	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis	Jumlah Koleksi Naskah Kuno	210 Eks	210 Eks	210 Eks	210 Eks	210 Eks	100	210 Eks		100
2	23	03	2.02	02	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Buku	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100
2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN										
2	24	2			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Presentase Pengelolaan Arsip sesuai standar kearsipan									

2	24	2	2		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Pengelolaan Arsip sesuai standar kearsipan								
2	24	02	2.01	01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Presentasi jumlah arsip dinamis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	24	02	2.01	02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	meningkatnya penyelamatan dan pelestarian arsip	75 SKPD	75 SKPD	75 SKPD	75 SKPD	100	75 SKPD	75 SKPD	100
2	24	2	2		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Pengelolaan Arsip Statis								
2	24	02	2.02	02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Perlindungan dan pemeliharaan arsip daerah	33 SKPD	33 SKPD	33 SKPD	33 SKPD	100	33 SKPD	33 SKPD	100
2	24	3			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Presentase Penyelamatan Arsip								
2	24	3	01		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun									
2	24	3	01	01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	Jumlah Penilaian Penetapan dan Pelaksanaan PEmusnahan Arsip	18 SKPD		18 SKPD	18 SKPD	100	18 SKPD	18 SKPD	100
2	24	3	02		Perlindungan dan Penyelamatan arsip akibat Bencana yang berskala Kabupaten/Kota									
2	24	3	02	01	Evaluasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Jumlah Dokumen yang dievakuasi	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket
2	24	3	2.05		Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	Presentase Penelusuran Arsip Statis								
2	24	03	2.05	03	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Penyelamatan dan pelestarian arsip guna sejarah	20,00%	20,00%	3 sumber arsip	3 sumber arsip	99,78	3 sumber arsip	3 sumber arsip	100

Sumber : Renja Tahun 2023 dan pengolahan data LRA APBD TA. 2023

Adapun evaluasi terhadap kinerja keuangan yang dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2023 menunjukkan dari total anggaran Tahun 2023 sebesar Rp. 11.112.659.443,00 sampai dengan triwulan II Tahun 2023 dapat direalisasi sebesar Rp 5.633.657.495,00 atau mencapai 50,70%. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2023 tersaji pada tabel berikut

Tabel 2. 6

**Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Garut Tahun 2023 sampai dengan triwulan II**

Kode Rekening					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tahun 2023		
						Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1					2			
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	11.112.659.443,00	5.633.657.495,00	50,70
2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	11.112.659.443,00	5.633.657.495,00	50,70
2	23	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.432.072.133,00	3.770.022.210,00	50,73
2	23	01	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	216.480.000,00	82.240.400,00	37,99
2	23	01	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.000.000,00	22.491.000,00	74,97
2	23	01	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	23.800.000,00	23.800.000,00	100,00
2	23	01	01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	17.000.000,00	8.499.800,00	50,00
2	23	01	01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	17.400.000,00	8.699.800,00	50,00
2	23	01	01	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.000.000,00	7.499.800,00	50,00
2	23	01	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.000.000,00	11.250.000,00	75,00
2	23	01	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	98.280.000,00	-	0,00
2	23	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.615.351.143,00	2.504.837.809,00	44,61
2	23	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.615.351.143,00	2.504.837.809,00	44,61
2	23	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	150.000.000,00	39.983.777,00	26,66
2	23	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	150.000.000,00	39.983.777,00	26,66
2	23	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	27.768.000,00	27.768.000,00	100,00
2	23	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya	27.768.000,00	27.768.000,00	100,00
2	23	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	504.936.590,00	423.497.445,00	83,87
2	23	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.295.300,00	5.147.650,00	50,00
2	23	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	199.736.240,00	173.679.545,00	86,95
2	23	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.382.050,00	11.382.050,00	100,00
2	23	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	195.511.800,00	195.346.200,00	99,92
2	23	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	23.248.200,00	9.462.000,00	40,70

2	23	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	24.123.000,00	12.040.000,00	49,91
2	23	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40.640.000,00	16.440.000,00	40,45
2	23	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	400.000.000,00	385.867.516,00	96,47
2	23	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	200.000.000,00	197.867.516,00	98,93
2	23	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200.000.000,00	188.000.000,00	94,00
2	23	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	267.907.500,00	96.038.783,00	35,85
2	23	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	84.416.400,00	22.156.108,00	26,25
2	23	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	183.491.100,00	73.882.675,00	40,26
2	23	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	249.628.900,00	209.788.480,00	84,04
2	23	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30.429.200,00	15.214.600,00	50,00
2	23	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	30.104.500,00	7.902.500,00	26,25
2	23	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	189.095.200,00	186.671.380,00	98,72
2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.553.024.750,00	1.390.287.670,00	54,46
2	23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.976.817.550,00	1.098.111.170,00	55,55
2	23	02	2.01	06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	220.938.400,00	220.067.900,00	99,61
2	23	02	2.01	07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	519.924.750,00	408.200.000,00	78,51
2	23	02	2.01	08	Pengembangan Bahan Pustaka	885.954.400,00	185.719.650,00	20,96
2	23	02	2.01	09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	350.000.000,00	284.123.620,00	81,18
2	23	02	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	576.207.200,00	292.176.500,00	50,71
2	23	02	2.02	01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	274.470.000,00	54.407.800,00	19,82
2	23	02	2.02	04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	301.737.200,00	237.768.700,00	78,80
2	23	03			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	330.495.960,00	98.672.000,00	29,86
2	23	03	2.01		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	120.964.600,00	95.592.000,00	79,02
2	23	03	2.01	01	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	120.964.600,00	95.592.000,00	79,02
2	23	03	2.02		Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	209.531.360,00	3.080.000,00	
2	23	03	2.02	01	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	111.193.360,00	-	
2	23	03	2.02	02	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	98.338.000,00	3.080.000,00	
2	24				KEARSIPAN	459.175.200,00	204.754.245,00	44,59
2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	459.175.200,00	204.754.245,00	44,59
2	24	02	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	313.875.500,00	114.397.555,00	36,45
2	24	02	2.01	01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	182.711.000,00	-	0,00
2	24	02	2.01	02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	131.164.500,00	114.397.555,00	87,22
2	24	02	2.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	145.299.700,00	90.356.690,00	
2	24	02	2.02	02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	145.299.700,00	90.356.690,00	62,19
2	24	03			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	337.891.400,00	169.921.370,00	50,29

2	24	03	2.01		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	151.155.500,00	77.102.750,00	51,01
2	24	03	2.01	1	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	151.155.500,00	77.102.750,00	51,01
2	24	03	2.05		Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	186.735.900,00	92.818.620,00	
2	24	03	2.05	03	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	186.735.900,00	92.818.620,00	49,71
JUMLAH						11.112.659.443,00	5.633.657.495,00	50,70

Sumber : Pengelolaan Data LRA APBD TA. 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat 35 subkegiatan yang tidak mencapai target, hal ini dikarenakan masih berjalannya kegiatan Selain itu, terdapat 3 subkegiatan yang sudah mencapai target yang disebabkan karena pelaksanaan kegiatan sesuai dengan waktu perencanaan .

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah. Implikasi merupakan actor atau suatu kesimpulan dari target. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah sebagai berikut :

- a. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pada **Tahun 2023 (TW II)** berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan .
- b. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Selain itu, terkait perlu adanya kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan. Adapun factor perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi factor-faktor penyebab tersebut diatas antara lain :

- a. Perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada para Kabag, Kasubag, Kasi / Sub Koordinator yang menangani kegiatan.

- b. Perlu adanya koordinasi kepada instansi terkait masalah pelimpahan kegiatan yang akan dilaksanakan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Selanjutnya Capaian Renstra merupakan hasil pelaksanaan Renja setiap tahun. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemantauan dan supervisi untuk memastikan rencana program Renstra dapat diwujudkan. Evaluasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan selama kurun waktu 1 (satu) tahun dan perbandingan realisasi Renja SKPD tahun sebelumnya serta target kinerja kegiatan Renja tahun berjalan dapat dilihat pada table 2.7 berikut ini:

Tabel 2. 7

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Garut Tahun 2023 TW II

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (Tahun 2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023(TW II))		Realisasi Kinerja Triwulanan								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab (Bidang /Kasi)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV							
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13= 6+12		14=13/5 x 100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Perpustakaan																					
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																					
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Pemenuhan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan sesuai ketentuan	85%	216.480.000,00	85%	216.480.000,00	85%	216.480.000,00														
		Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencana	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000														

		Perangkat Daerah (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	an Perangkat Daerah																					
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	23.800.000	1 Dokumen	23.800.000	1 Dokumen	23.800.000															
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	17.000.000	1 Dokumen	17.000.000	1 Dokumen	17.000.000															
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	17.400.000	1 Dokumen	17.400.000	1 Dokumen	17.400.000															
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.000.000															
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian	Jumlah Laporan Capaian	6 Laporan	15.000.000	6 Lap	15.000.000	6 Laporan	15.000.000															

		Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			ora n																		
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Lapora n	98.280.0 00	1 Lap ora n	98.280.000	1 Laporan	98.280.000															
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran		5.001.650.213,00		5.001.650.213,00		5.001.650.213,00															
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	5.001.650.213,00	12 Bulan	5.001.650.213,00	12 Bulan	5.001.650.213,00															
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah sesuai ketentuan	1 Doku men	150.000.000,00	1 Dok um en	150.000.000,00	1 Dokumen	150.000.000,00															
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan	1 Doku men	150.000.000,00	1 Dok	150.000.000,00	1 Dokumen	150.000.000,00															

			an Barang Milik Daerah SKPD			um en																												
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Pelaksanaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		27.768.000,00		27.768.000,00																											
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	60 Stel	27.768.000,00	60 Stel	27.768.000,00	60 Stel	27.768.000,00																									
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran		796.841.450,00		796.841.450,00		796.841.450,00																									
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 JENIS	30.430.500	10 JENIS	30.430.500	10 JENIS	30.430.500																									
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (peralatan elektronik , Alih Media dll)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Bulan	254.525.900	12 Bulan	254.525.900	12 Bulan	254.525.900																									

		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Bulan	11.382.050	12 Bulan	11.382.050	12 Bulan	11.382.050														
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Bulan	412.491.800	12 Bulan	412.491.800	12 Bulan	412.491.800														
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Bulan	23.248.200	12 Bulan	23.248.200	12 Bulan	23.248.200														
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Bulan	24.123.000	12 Bulan	24.123.000	12 Bulan	24.123.000														
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	40.640.000	12 Bulan	40.640.000	12 Bulan	40.640.000														
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase pemenuhan kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan		995.400.000,00		995.400.000,00		995.400.000,00														

			Pemerintah Daerah																			
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas	1 Unit	545.400.000,00	1 Unit	545.400.000,00	1 Unit	545.400.000,00													
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 ruang	200.000.000,00	2 ruang	200.000.000,00	2 ruang	200.000.000,00													
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Dokumen	250.000.000,00	1 Dokumen	250.000.000,00	1 Dokumen	250.000.000,00													
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran		267.907.500,00		267.907.500,00		267.907.500,00													
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	84.416.400,00	1 Laporan	84.416.400,00	1 Laporan	84.416.400,00													
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	183.491.100,00	3 Laporan	183.491.100,00	3 Laporan	183.491.100,00													

		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		331.628.900,00		331.628.900,00	331.628.900,00														
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Jenis	30.429.200,00	4 Jenis	30.429.200,00	30.429.200,00														
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	30.104.500,00	25 Unit	30.104.500,00	30.104.500,00														
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	271.095.200,00	5 Unit	271.095.200,00	271.095.200,00														
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Prose		1.955.589.550,00		1.955.589.550,00	1.955.589.550,00														

		Pengelolaan Perustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.335.412.350,00		1.335.412.350,00		1.335.412.350,00													
		Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	300 Orang	220.938.400,00	300 Orang	220.938.400,00	300 Orang	220.938.400,00													
		Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Titik Lokasi Layanan	200 Laynan	563.693.950,00	200 Laynan	563.693.950,00	200 Laynan	563.693.950,00													
		Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Perpustakaan	15000 Eks	200.780.000,00	15000 Eks	200.780.000,00	15000 Eks	200.780.000,00													
		Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	3000 eks	350.000.000,00	3000 eks	350.000.000,00	3000 eks	350.000.000,00													
		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			620.177.200,00		620.177.200,00		620.177.200,00													
		Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Prosentase Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	100%	274.470.000,00	100%	274.470.000,00	100%	274.470.000,00													

		Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	6 Perpustakaan	345.707.200,00	6 Perpustakaan	345.707.200,00																
		PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONALDAN NASKAH KUNO	Prosentase Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		330.495.960,00		330.495.960,00																
		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota			120.964.600,00		120.964.600,00																
		Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Dilakukan Pengolahan dan Penyiangan	100%	120.964.600,00	100%	120.964.600,00	100%															
		Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			209.531.360,00		209.531.360,00																

		Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	Jumlah Koleksi Buku Budaya Etnis Nusantara	100%	111.193.360,00	100%	111.193.360,00	100%	111.193.360,00															
		Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Pengelolaan Buku Entis Nusantara	100%	98.338.000,00	100%	98.338.000,00	100%	98.338.000,00															
		KEARSIPAN	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan		830.195.350,00		830.195.350,00		830.195.350,00															
		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan		830.195.350,00		830.195.350,00		830.195.350,00															
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP			503.113.950,00		503.113.950,00		503.113.950,00															
		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis		357.814.250,00		357.814.250,00		357.814.250,00															
		Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	100%	226.649.750,00	100%	226.649.750,00	100%	226.649.750,00															

		Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Arsi yanag terpelihara	75 SKPD	131.164.500,00	75 SKPD	131.164.500,00	75 SKPD	131.164.500,00				114.397.555,00												
		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah arsip yang akan dilakukan penilaian, penetapan dan pelaksanaan pemusnahan arsip yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun		145.299.700,00		145.299.700,00		145.299.700,00				90.356.690,00												
		Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip terakuisisi	100%	145.299.700,00	100%	145.299.700,00	100%	145.299.700,00				90.356.690,00												
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP			327.081.400,00		327.081.400,00		327.081.400,00				169.921.370,00												
		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Prosentase Pemusnahan Arsip di SKPD	100%	140.345.500,00	100%	140.345.500,00	100%	140.345.500,00				77.102.750,00												
		Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun (Dinas)	Jumlah daftar autentisitas arsip sesuai persyaratan penjaminan keabsahan arsip yang	100%	140.345.500,00	100%	140.345.500,00	100%	140.345.500,00				77.102.750,00												

2.2.3. Dukungan Pemerintah Daerah dalam Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) & Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) serta Proyek Strategis Nasional (*Stunting*)

Adapun dukungan pemerintah daerah dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Tahun 2023 beserta realisasi capaian SPM serta program yang mendukung pencapaian SPM disajikan pada tabel 2.8

Tabel 2.8
Dukungan Pemerintah Daerah dalam Pencapaian SPM dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Tahun 2023

No	SPM		TPB		Target Capaian SPM 2022	Capaian SPM 2022	SKPD	Program
	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Tujuan	Target				
1. SPM PENDIDIKAN								
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 -15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	4.1. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	100%	97,43%	Dinas Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan

No	SPM		TPB		Target Capaian SPM 2022	Capaian SPM 2022	SKPD	Program
	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Tujuan	Target				
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 –18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	4.1. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	100 %	92,37%	Dinas Pendidikan	1. Program Pengelolaan Pendidikan 2. Program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	4.2. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan penguasaan anak usia dini, penguasaan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.	100 %	94,99%	Dinas Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan

No	SPM		TPB		Target Capaian SPM 2022	Capaian SPM 2022	SKPD	Program
	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Tujuan	Target				
2. SPM KESEHATAN								
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	Tujuan 1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di manapun.	1.4. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro	100 %	95,49%	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	Tujuan 3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.1. Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup	100 %	94,42%	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatk	Tujuan 3 Menjamin Kehidupan yang	3.2. Pada tahun 2030, mengakhir	100 %	98,89%	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan

No	SPM		TPB		Target Capaian SPM 2022	Capaian SPM 2022	SKPD	Program
	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Tujuan	Target				
		an layanan kesehatan	Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	i kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.				Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	Tujuan 3 Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.2. Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.	100 %	91,11 %	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	Tujuan 3 Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.8. Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan	100 %	96,21 %	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

No	SPM		TPB		Target Capaian SPM 2022	Capaian SPM 2022	SKPD	Program
	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Tujuan	Target				
				dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.				
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif,	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	Tujuan 3 Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia		100 %	98,91%	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	Tujuan 1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun.	1.3. Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	100 %	90,30%	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	Tujuan 3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan		100 %	95,34%	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

No	SPM		TPB		Target Capaian SPM 2022	Capaian SPM 2022	SKPD	Program
	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Tujuan	Target				
			Seluruh Penduduk Semua Usia					
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah Warga Negara penderita <i>diabetes mellitus</i> yang mendapatkan layanan kesehatan	Tujuan 3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.3. Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.	100 %	90,46%	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	Tujuan 3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.3. Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.	100 %	85,73%	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga <i>tuberculosis</i> yang mendapatkan layanan kesehatan	Tujuan 3 Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk	3.3. Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit	100 %	99,65%	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

No	SPM		TPB		Targ et Capa ian SPM 202 2	Capa ian SPM 2022	SKPD	Program
	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapai an	Tujuan	Target				
			Semua Usia	tropis yang terabaikan , dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.				
1 2	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahka n daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahka n daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) yang mendapatk an layanan kesehatan	Tujuan 3 Menjamin Kehidupa n yang Sehat dan Meningka tkan Kesejahte raan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.3. Pada tahun 2030, mengakhir i epidemi AIDS, tuberkulos is, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan , dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	100 %	99,6 9%	Dinas Kesehatan RSUD dr. Slamet	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
3. SPM PEKERJAAN UMUM								
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperole h kebutuhan pokok air minum sehari-hari	6.1. Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangka u bagi semua.	6.1.1* Proporsi populasi yang mengguna kan layanan air minum yang dikelola secara aman.	100 %	87,0 2%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengelolaan Dan Pengembang an Sistem Penyediaan Air Minum
2	Penyediaan Pelayanan Pengolaha n air limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang memperole h layanan pengolaha n air limbah domestik	6.2. Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersiha n yang me madai dan merata bagi	6.2.1. Proporsi populasi yang mengguna kan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas	100 %	72,0 6%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengelolaan Dan Pengembang an Sistem Air Limbah

No	SPM		TPB		Target Capaian SPM 2022	Capaian SPM 2022	SKPD	Program
	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Tujuan	Target				
			semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	cuci tangan dengan air dan sabun. 6.3.1. Proporsi limbah cair yang diolah secara aman.				
4. SPM PERUMAHAN RAKYAT								
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang Layak huni bagi korban bencana Kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	11. Menjadikan kota dan pemukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.	11.5. Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	100 %	100 %	Dinas Perumahan dan Permukiman	Program Pengembangan Perumahan Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah	11. Menjadikan kota dan pemukiman inklusif, aman, tangguh, dan	11.1. Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak,	100 %	100 %	Dinas Perumahan dan Permukiman	Program Pengembangan Perumahan

No	SPM		TPB		Target Capaian SPM 2022	Capaian SPM 2022	SKPD	Program
	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Tujuan	Target				
	Pemerintah Daerah kabupaten / kota	kabupaten / kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	berkelanjutan.	aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.				
5. SPM TRANTIBUMLINMAS								
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	16. Mengutamakan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	16.3. Menggalakan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua. 16.6. Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	100 %	100 %	Satuan Polisi Pamong Praja	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	16. Mengutamakan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun		100 %	82,9 %	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Penanggulangan Bencana

No	SPM		TPB		Target Capaian SPM 2022	Capaian SPM 2022	SKPD	Program
	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Tujuan	Target				
			Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan					
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	16.Mengutamakan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan		100 %	41,99%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Penanggulangan Bencana
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	16.Mengutamakan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di		100 %	100 %	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Penanggulangan Bencana

No	SPM		TPB		Target Capaian SPM 2022	Capaian SPM 2022	SKPD	Program
	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Tujuan	Target				
			Semua Tingkatan					
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	16. Mengutamakan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan		100 %	100 %	Dinas Pemadam Kebakaran	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
6. SPM SOSIAL								
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di manapun.	1.3. Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	100 %	100 %	Dinas Sosial	Program Rehabilitasi Sosial
2	Rehabilitasi sosial dasar anak	Jumlah anak telantar yang	1. Mengakhiri kemiskinan	1.3. Menerapkan secara nasional	100 %	100 %	Dinas Sosial	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

No	SPM		TPB		Target Capaian SPM 2022	Capaian SPM 2022	SKPD	Program
	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Tujuan	Target				
	telantar di luar panti	memperoleh rehabilitasi	an dalam segala bentuk di manapun .	sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.				
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di manapun .	1.3. Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	100 %	100 %	Dinas Sosial	Program Pemberdayaan Sosial
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan Pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di manapun .	1.3. Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling	100 %	100 %	Dinas Sosial	Program Rehabilitasi Sosial

No	SPM		TPB		Target Capaian SPM 2022	Capaian SPM 2022	SKPD	Program
	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Tujuan	Target				
				miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.				
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di manapun.	1.5. Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	100 %	100 %	Dinas Sosial	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Sumber: Data Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sebagian besar capaian SPM telah dapat mencapai target, namun masih terdapat jenis pelayanan yang belum mencapai target, adapun capaian SPM yang masih tergolong sangat rendah adalah pada jenis pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (Sesuai dengan capaian urusan SPM SKPD). Untuk tujuan dan target SDGs yang tidak terkait dengan area SPM tidak diuraikan lebih lanjut dalam dokumen ini, karena tidak ada perubahan target. *Stunting* menjadi salah satu proyek strategis nasional, seiring dengan hal tersebut upaya Kabupaten Garut dalam menurunkan angka prevalensi *stunting* adalah dengan dibentuknya Tim Percepatan Penurunan *Stunting* melalui penerbitan Keputusan Bupati Garut Nomor 440/KEP.189-DISPUSIP/2022, serta diterbitkannya Program TOSS

(Temukan, Obati, Sayangi balita *Stunting*) guna mengatasi *stunting* di Kabupaten Garut. Program TOSS ini merupakan program lanjutan setelah BPS (Bulan Penimbangan *Stunting*) yang telah berjalan selama bulan Juni tahun 2022 dalam rangka mengobati balita *stunting* serta mencegah timbulnya kasus *stunting* baru di Kabupaten Garut. Dengan program ini diharapkan dapat menurunkan angka prevalensi *stunting* di Kabupaten Garut yang sekarang berada pada angka 15,6 % menjadi berada dibawah rata-rata nasional yaitu 14%. Pemkab Garut berhasil menurunkan angka prevalensi *stunting* menjadi 23,6 % pada tahun 2022, yang merupakan penurunan tertinggi kedua di Jawa Barat. Melalui gerakan bersama bulan pencarian *stunting*, pemberian makanan tambahan, pengobatan penyakit penyerta, pemantauan tumbuh kembang, peningkatan pola asuh, peningkatan cakupan dan kualitas layanan kesehatan serta kolaborasi stakeholder bapak asuh.

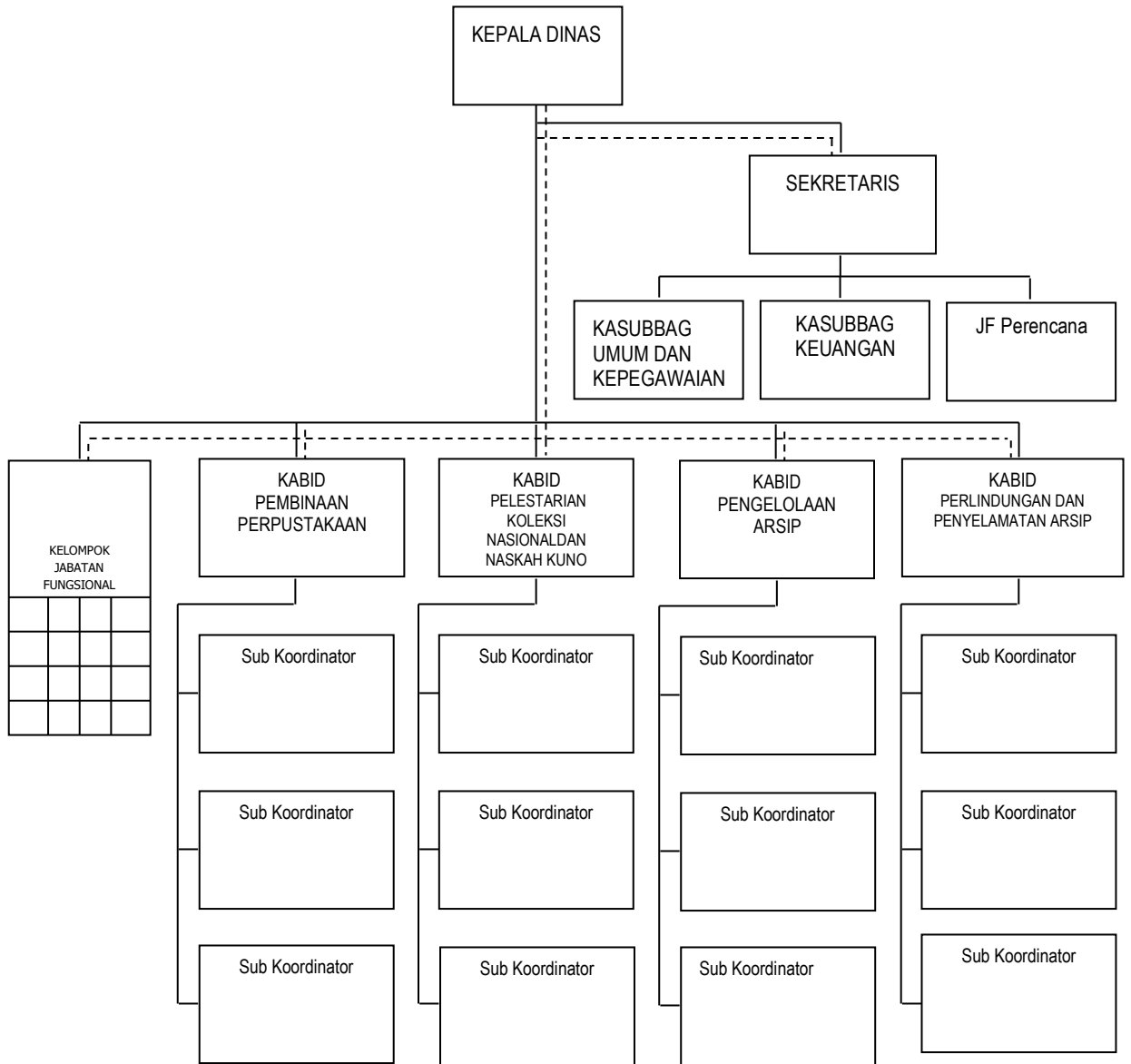
2.3. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan melalui Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator – indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan kepada masyarakat. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Adapun tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berdasarkan Peraturan Bupati Garut Nomor 235 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 235) maka perangkat daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolak ukur kinerja dan indikator pelayanan masing masing

sesuai tupoksi serta norma dan standar pelayanan perangkat daerah yang bersangkutan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan berikut:

Bagan 2. 1 Struktur organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Garut



KETERANGAN :

- = GARIS KOMANDO / PEMBINAAN
- - - - - = GARIS KOORDINASI

Sumber: Perbup

Dengan Rincian tugas pokok dan fungsi struktur organisasi sebagai berikut:

Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Koordinator;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah.
- c. Bidang Pembinaan Perpustakaan, membawahi: Sub Koordinator.
- d. Bidang Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno, membawahi: Sub Koordinator.
- e. Bidang Arsip, membawahi: Sub Koordinator.
- f. Bidang Perlindungan dan Penyelamatan Arsip, membawahi: Sub Koordinator.
- g. Unit Pelaksana Teknis; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Selanjutnya dilakukan analisis capaian kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja Program dan kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Untuk lebih jelasnya dapat disajikan tabel 2.9 sebagai berikut

Tabel 2. 9

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Kabupaten Garut

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun2 022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Meningkatnya pembudayaan kegemaran membaca dan kecerdasan (literasi) masyarakat			35500	38000	39500	41000	35500	38000	39500	41000	
2	Meningkatnya penerapan standar baku kearsipan			36.15 %	40.76 %	45.38 %	50%	36.15 %	40.76 %	45.38 %	50%	
3	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Pelayanan DISPUSIP			BB	BB	BB	BB	100%	100%	BB	A	
				79.5%	79.75 %	80%	80.25 %	79.5%	79.75 %	80%	80.25 %	
<p><i>Sumber : Pengolahan Data Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2023</i></p>												

2.4. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut.

- a. Kurangnya tenaga pengelola Perpustakaan / Pustakawan di berbagai jenis Perpustakaan;
- b. Kurangnya kuantitas dan kualitas serta jenis koleksi bahan Perpustakaan di berbagai jenis Perpustakaan.
- c. Belum optimalnya promosi dan publikasi Perpustakaan dalam pengembangan minat dan budaya baca masyarakat.
- d. Akses layanan Perpustakaan belum optimal.
- e. Belum memadainya layanan Perpustakaan yang berbasis IT.
- f. Masih minimnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perpustakaan.
- g. Masih sedikitnya fasilitas Perpustakaan terbuka yang ada di area publik.
- h. Masih sedikitnya lembaga, Instansi, Sekolah dan Masyarakat yang memiliki Perpustakaan.
- i. Masih terbatasnya sarana & Prasarana Perpustakaan.
- j. Budaya baca masyarakat yang masih rendah.
- k. Layanan perpustakaan berbasis TIK yang masih belum memadai.
- l. Penguatan sarana dan prasarana Perpustakaan yang belum sesuai dengan standar Perpustakaan.
- m. Transformasi Perpustakaan berbasis Inklusi Sosial
- n. Keterbatasan sarana dan prasarana Kearsipan.
- o. Masih rendahnya sumber daya pengelola Kearsipan baik secara kuantitatif maupun kualitatif.
- p. Rendahnya kepedulian terhadap pengelolaan kearsipan.
- q. Rendahnya pemanfaatan Teknologi Informasi Kearsipan (SIKD).

Masih terbatasnya penyelamatan dan pelestarian arsip yang ada di pemerintah maupun masyarakat

2.5. Review terhadap Rancangan Perubahan Renja

Review adalah aktivitas untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis

(Renstra) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan serta mengacu kepada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Garut sebagai dokumen perencanaan pembangunan dan sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Penyusunan Perubahan Renja DISPUSIP Tahun 2023 dilakukan dengan mengacu pada Perubahan RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023 yang merupakan penjabaran tahun keempat pelaksanaan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024.

Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 merupakan acuan bagi penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023. Dalam rangka *review* terhadap Rancangan Perubahan RKPD maka dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan pada Perubahan Renja.

Proses review terhadap Rancangan Perubahan RKPD dilakukan untuk mengidentifikasi kesesuaian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang direncanakan pada perubahan Renja dengan arahan Rancangan Perubahan RKPD. Proses perbandingan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan pada Perubahan Renja DISPUSIP Tahun 2023 menghasilkan temuan-temuan sebagai berikut:

1. Jumlah bidang urusan pemerintahan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan pada Perubahan Renja DISPUSIP Tahun 2023 telah sesuai yaitu sebanyak 2 bidang urusan yaitu bidang perencanaan, serta bidang penelitian dan pengembangan;
2. Jumlah program antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan pada Perubahan Renja DISPUSIP Tahun 2023 telah sesuai yaitu sebanyak 5 program, yaitu :
 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 2. Program Pembinaan Perpustakaan
 3. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno
 4. Pengelolaan Arsip
 5. Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip

3. Jumlah kegiatan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan pada Perubahan Renja DISPUSIP Tahun 2023 telah sesuai yaitu sebanyak 17 kegiatan, yang terdiri dari 42 sub kegiatan;
4. Kebutuhan dana/pagu Indikatif yang tercantum pada Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 11.112.659.443,00 telah sesuai dengan kebutuhan dana/pagu indikatif hasil analisis kebutuhan pada Perubahan Renja DISPUSIP Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 11.112.659.443,00 Secara kronologis, pagu indikatif Renja DISPUSIP Tahun 2023 sebelum perubahan mencapai sebesar Rp. 11.112.659.443,00 dan mengalami penyesuaian sebesar Rp. 213.700.930 pada APBD Tahun 2023 menjadi Rp. 10.898.958.513, dan hasil analisis kebutuhan pagu indikatif pada Perubahan Renja DISPUSIP Tahun 2023 mencapai sebesar Rp. 10.898.958.513,00 atau berkurang Rp. 213.700.930,00 dari anggaran pada APBD Tahun 2023.
5. Sesuai Hasil Analisis Kebutuhan, indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja DISPUSIP Tahun 2023 telah disusun sesuai dengan indikator kinerja sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Menteri ;
6. Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daer

Tabel 2.
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD tahun 2023 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Garut

Nama Perangkat Daerah: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Garut
Lembar.....dari.....

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	Perpustakaan				10.898.958.513,00	Perpustakaan				10.998.958.513,00	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				7.787.676.063,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				7.787.676.063,00	
	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Prosentase Pemenuhan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan sesuai ketentuan	85%	216.480.000,00	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Prosentase Pemenuhan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan sesuai ketentuan	100%	216.480.000,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	DISPUSIP	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	30.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	DISPUSIP	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	30.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	DISPUSIP	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	23.800.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	DISPUSIP	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	23.800.000	

	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	DISPUSIP	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	17.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	DISPUSIP	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	17.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	DISPUSIP	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	17.400.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	DISPUSIP	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	17.400.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	DISPUSIP	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	15.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	DISPUSIP	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	15.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	DISPUSIP	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	15.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	DISPUSIP	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	15.000.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	DISPUSIP	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	98.280.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	DISPUSIP	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	98.280.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran		5.001.650.213,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran		5.001.650.213,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DISPUSIP	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	5.001.650.213,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DISPUSIP	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	5.001.650.213,00	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	DISPUSIP	Presentase Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah sesuai ketentuan	1 Dokumen	150.000.000,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	DISPUSIP	Presentase Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah sesuai ketentuan	1 Dokumen	150.000.000,00	
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	DISPUSIP	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	150.000.000,00	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	DISPUSIP	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	150.000.000,00	

	Administrasi Kpegawaian Perangkat Daerah	DISPUSIP	Prosentase Pelaksanaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		27.768.000,00	Administrasi Kpegawaian Perangkat Daerah	DISPUSIP	Prosentase Pelaksanaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		27.768.000,00	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya	DISPUSIP	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	60 Stel	27.768.000,00	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya	DISPUSIP	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	60 Stel	27.768.000,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran		796.841.450,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran		796.841.450,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DISPUSIP	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 JENIS	30.430.500	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DISPUSIP	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 JENIS	30.430.500	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (peralatan elektronik , Alih Media dll)	DISPUSIP	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Bulan	254.525.900	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (peralatan elektronik , Alih Media dll)	DISPUSIP	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Bulan	254.525.900	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DISPUSIP	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Bulan	11.382.050	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DISPUSIP	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Bulan	11.382.050	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DISPUSIP	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Bulan	412.491.800	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DISPUSIP	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Bulan	412.491.800	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	DISPUSIP	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Bulan	23.248.200	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	DISPUSIP	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Bulan	23.248.200	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	DISPUSIP	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Bulan	24.123.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	DISPUSIP	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Bulan	24.123.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DISPUSIP	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	40.640.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DISPUSIP	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	40.640.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		persentase pemenuhan kebutuhan Pengadaan Barang		995.400.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		persentase pemenuhan kebutuhan Pengadaan Barang		995.400.000,00	

			Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	DISPUSIP	Jumlah Kendaraan Dinas	1 Unit	545.400.000,00	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	DISPUSIP	Jumlah Kendaraan Dinas	1 Unit	545.400.000,00	
	Pengadaan Mebel	DISPUSIP	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 ruang	200.000.000,00	Pengadaan Mebel	DISPUSIP	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 ruang	200.000.000,00	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DISPUSIP	Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Dokumen	250.000.000,00	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DISPUSIP	Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Dokumen	250.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran		267.907.500,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran		267.907.500,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DISPUSIP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	84.416.400,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DISPUSIP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	84.416.400,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DISPUSIP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	183.491.100,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DISPUSIP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	183.491.100,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		331.628.900,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		431.628.900,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DISPUSIP	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Jenis	30.429.200,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DISPUSIP	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Jenis	30.429.200,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	DISPUSIP	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	25 Unit	30.104.500,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	DISPUSIP	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	25 Unit	30.104.500,00	

	Dinas Operasional atau Lapangan		dibayarkan Pajak dan Perizinannya			Dinas Operasional atau Lapangan		dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DISPUSIP	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	271.095.200,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DISPUSIP	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	371.095.200,00	
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN		Prose		1.955.589.550,00	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN				1.955.589.550,00	
	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				1.335.412.350,00	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				1.335.412.350,00	
	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Garut	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	300 Orang	220.938.400,00	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Garut	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	300 Orang	220.938.400,00	
	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Kabupaten Garut	Jumlah Titik Lokasi Layanan	200 Laynan	563.693.950,00	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Kabupaten Garut	Jumlah Titik Lokasi Layanan	200 Laynan	563.693.950,00	
	Pengembangan Bahan Pustaka	DISPUSIP	Jumlah Perpustakaan	15000 Eks	200.780.000,00	Pengembangan Bahan Pustaka	DISPUSIP	Jumlah Perpustakaan	15000 Eks	200.780.000,00	
	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	DISPUSIP	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	3000 eks	350.000.000,00	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	DISPUSIP	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	3000 eks	350.000.000,00	
	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				620.177.200,00	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				620.177.200,00	
	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Kabupaten Garut	Prosentase Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	100%	274.470.000,00	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Kabupaten Garut	Prosentase Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	100%	274.470.000,00	
	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Kabupaten Garut	Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian,	6 Perpustakaan	345.707.200,00	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Kabupaten Garut	Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian,	6 Perpustakaan	345.707.200,00	

			dan Pendaftaran Naskah Kuno					dan Pendaftaran Naskah Kuno			
	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONALDAN NASKAH KUNO		Prosentase Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		330.495.960,00		PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONALDAN NASKAH KUNO	Prosentase Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		330.495.960,00	
	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota				120.964.600,00		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota			120.964.600,00	
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	Kab.Garut	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Dilakukan Pengolahan dan Penyiangan	100%	120.964.600,00		Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Dilakukan Pengolahan dan Penyiangan	100%	120.964.600,00	
	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah DaerahKabupaten/Kota				209.531.360,00		Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah DaerahKabupaten/Kota			209.531.360,00	
	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	DISPUSIP	Jumlah Koleksi Buku Budaya Etnis Nusantara	100%	111.193.360,00		Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	Jumlah Koleksi Buku Budaya Etnis Nusantara	100%	111.193.360,00	
	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	DISPUSIP	Jumlah Pengelolaan Buku Entis Nusantara	100%	98.338.000,00		Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Pengelolaan Buku Entis Nusantara	100%	98.338.000,00	
	KEARSIPAN		Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan		830.195.350,00		KEARSIPAN	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan		830.195.350,00	
	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan		830.195.350,00		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan		830.195.350,00	

	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP				503.113.950,00	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP				503.113.950,00	
	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis		357.814.250,00	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis		357.814.250,00	
	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Kabupaten Garut	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	100%	226.649.750,00	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Kabupaten Garut	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	100%	226.649.750,00	
	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Kabupaten Garut	Jumlah Arsi yanag terpelihara	75 SKPD	131.164.500,00	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Kabupaten Garut	Jumlah Arsi yanag terpelihara	75 SKPD	131.164.500,00	
	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah arsip yang akan dilakukan penilaian, penetapan dan pelaksanaan pemusnahan arsip yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun		145.299.700,00	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah arsip yang akan dilakukan penilaian, penetapan dan pelaksanaan pemusnahan arsip yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun		145.299.700,00	
	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Kabupaten Garut	Jumlah Arsip terakuisisi	100%	145.299.700,00	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Kabupaten Garut	Jumlah Arsip terakuisisi	100%	145.299.700,00	
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP				327.081.400,00	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP				327.081.400,00	
	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun		Prosentase Pemusnahan Arsip di SKPD	100%	140.345.500,00	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun		Prosentase Pemusnahan Arsip di SKPD	100%	140.345.500,00	
	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	Kabupaten Garut	Jumlah daftar autentisitas arsip sesuai persyaratan penjaminan keabsahan arsip yang dinilai dan ditetapkan	100%	140.345.500	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	Kabupaten Garut	Jumlah daftar autentisitas arsip sesuai persyaratan penjaminan keabsahan arsip yang dinilai dan ditetapkan	100%	140.345.500	

	Perlindungan dan Penyelamatan arsip akibat Bencana yang berskala Kabupaten/Kota		Presentase Jumlah Arsip yang terselamatkan	100%	0	Perlindungan dan Penyelamatan arsip akibat Bencana yang berskala Kabupaten/Kota		Presentase Jumlah Arsip yang terselamatkan	100%	0
	Evaluasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana		Jumlah arsip yang dilakukan evakuasi, identifikasi, pemulihan arsip akibat bencana			Evaluasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana		Jumlah arsip yang dilakukan evakuasi, identifikasi, pemulihan arsip akibat bencana		
	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang			100%	186.735.900,00	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang			100%	186.735.900,00
	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Kabupaten Garut	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang dilakukan penetapan dan pengumuman	100%	186.735.900,00	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Kabupaten Garut	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang dilakukan penetapan dan pengumuman	100%	186.735.900,00

Tabel 2. 10

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Garut Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelom- pok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perang- kat Daerah Penan- ggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pa- gu In- di- ka- ti- f				
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan						N as io na l	D a e r a h	
1	1	1				7.432.072.133,00	7.787.676.063,00		7.432.072.133,00	7.787.676.063,00	Kab.Garut							
1	1	1	2.01			216.480.000,00	216.480.000,00		216.480.000,00	216.480.000,00								
2	23	01	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			30.000.000	30.000.000	Kab.Garut	APBD						
2	23	01	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			23.800.000	23.800.000	Kab.Garut	APBD						
2	23	01	01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			17.000.000	17.000.000	Kab.Garut	APBD						
2	23	01	01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			17.400.000	17.400.000	Kab.Garut	APBD						
2	23	01	01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			15.000.000	15.000.000	Kab.Garut	APBD						

2	23	01	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	Kab.Garut	APBD							
2	23	01	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	98.280.000	98.280.000	98.280.000	98.280.000	Kab.Garut	APBD							
2	23	01	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	5.615.351.143,00	5.001.650.213,00	5.615.351.143,00	5.001.650.213,00	Kab.Garut	APBD							
2	23	01	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	5.615.351.143,00	5.001.650.213,00	5.615.351.143,00	5.001.650.213,00	Kab.Garut	APBD							
2	23	01	03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah sesuai ketentuan	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab.Garut	APBD							
2	23	01	03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab.Garut	APBD							
2	23	01	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Pelaksanaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	27.768.000,00	27.768.000,00	27.768.000,00	27.768.000,00	Kab.Garut	APBD							
2	23	01	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	27.768.000,00	27.768.000,00	27.768.000,00	27.768.000,00	Kab.Garut	APBD							
2	23	01	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	504.936.590,00	796.841.450,00	504.936.590,00	796.841.450,00	Kab.Garut	APBD							
2	23	01	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10.295.300	30.430.500	10.295.300	30.430.500	Kab.Garut	APBD							
2	23	01	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (peralatan elektronik , Alih Media dll)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	199.736.240	254.525.900	199.736.240	254.525.900	Kab.Garut	APBD							
2	23	01	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	11.382.050	11.382.050	11.382.050	11.382.050	Kab.Garut	APBD							

2	23	01	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				195.511.800	412.491.800		195.511.800	412.491.800	Kab.Garut	APBD								
2	23	01	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				23.248.200	23.248.200		23.248.200	23.248.200	Kab.Garut	APBD								
2	23	01	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				24.123.000	24.123.000		24.123.000	24.123.000	Kab.Garut	APBD								
2	23	01	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				40.640.000	40.640.000		40.640.000	40.640.000	Kab.Garut	APBD								
2	23	01	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase pemenuhan kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				400.000.000,00	995.400.000,00		400.000.000,00	995.400.000,00	Kab.Garut	APBD								
2	23	01	07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas				-	545.400.000,00		-	545.400.000,00	Kab.Garut	APBD								
2	23	01	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				200.000.000,00	200.000.000,00		200.000.000,00	200.000.000,00	Kab.Garut	APBD								
2	23	01	07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				200.000.000,00	250.000.000,00		200.000.000,00	250.000.000,00	Kab.Garut	APBD								
2	23	01	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran				267.907.500,00	267.907.500,00		267.907.500,00	267.907.500,00	Kab.Garut	APBD								
2	23	01	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				84.416.400,00	84.416.400,00		84.416.400,00	84.416.400,00	Kab.Garut	APBD								
2	23	01	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				183.491.100,00	183.491.100,00		183.491.100,00	183.491.100,00	Kab.Garut	APBD								
2	23	01	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				249.628.900,00	331.628.900,00		249.628.900,00	331.628.900,00	Kab.Garut	APBD								

2	24	02	02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah arsip yang akan dilakukan penilaian, penetapan dan pelaksanaan pemusnahan arsip yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun				145.299.700,00	145.299.700,00		145.299.700,00	145.299.700,00	Kab.Garut	APBD								
2	24	02	02	02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip terakuisisi				145.299.700,00	145.299.700,00		145.299.700,00	145.299.700,00	Kab.Garut	APBD								
2	24	03			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					337.891.400,00	327.081.400,00		337.891.400,00	327.081.400,00	Kab.Garut	APBD								
2	24	03	01		Pemusnahan Arsip Dilindungi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Prosentase Pemusnahan Arsip di SKPD				151.155.500,00	140.345.500,00		151.155.500,00	140.345.500,00	Kab.Garut	APBD								
2	24	03	01	01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	Jumlah daftar autentisitas arsip sesuai persyaratan penjaminan keabsahan arsip yang dinilai dan ditetapkan				151.155.500,00	140.345.500		151.155.500,00	140.345.500	Kab.Garut	APBD								
2	24	03	02		Perlindungan dan Penyelamatan arsip akibat Bencana yang berskala Kabupaten/Kota	Presentase Jumlah Arsip yang terselamatkan									Kab.Garut	APBD								
2	24	03	02	01	Evaluasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Jumlah arsip yang dilakukan evakuasi, identifikasi, pemulihan arsip akibat bencana									Kab.Garut	APBD								
2	24	03	05		Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang					186.735.900,00	186.735.900,00		186.735.900,00	186.735.900,00	Kab.Garut	APBD								
2	24	03	05	03	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang dilakukan penetapan dan pengumuman				186.735.900,00	186.735.900,00		186.735.900,00	186.735.900,00	Kab.Garut	APBD								

Sumber : Rancangan RKPD Perubahan Tahun 2023

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2023 dilakukan jika terdapat hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Adanya kondisi keuangan daerah yang berubah adanya penambahan, pergeseran dan pengurangan anggaran serta perubahan target kinerja. Yang dalam hal ini di hubungkan pula dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran perubahan renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2023, maka dirumuskan pula program dan kegiatan beserta indikatornya yang akan di laksanakan pada tahun 2023, dengan memperhatikan pertimbangan antara lain:

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023 serta perubahan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun 2019-2024;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Garut;
3. Mendukung prioritas pembangunan daerah tahunan Kabupaten Garut;
4. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dan penggunaan sumber-sumber pendanaan yang terukur dalam rangka membayai pelaksanaan program secara efisien dan efektif sesuai ketentuan yang berlaku;
6. Pelaksanaan program dan kegiatan yang di rencanakan harus dapat merespon isu-isu strategis pembangunan daerah Penyusunan perubahan renja pada rumusan program dan kegiatannya mengacu pada visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 dan juga Perubahan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang secara operasional dijabarkan dalam

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023. Visi pembangunan daerah yang merupakan visi Bupati dan Wakil Bupati Garut terpilih periode tahun 2019-2024 adalah: "Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera "Makna yang terkandung dalam visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bertaqwa : Terwujudnya masyarakat yang berakhlak mulia, menjunjung nilai-nilai luhur agama dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berlandaskan Pancasila, diindikasikan dengan adanya perubahan perilaku dan budaya dalam lingkungan kehidupan masyarakat;
2. Maju : Terwujudnya Kabupaten Garut sebagai daerah yang mampu menggali, memanfaatkan dan mengelola segenap potensi sumber daya yang dimiliki secara optimal untuk digunakan dalam proses pembangunan sehingga masyarakat memiliki kemampuan dalam membangun struktur ekonomi yang tangguh dan pertumbuhan ekonomi yang bernilai tambah tinggi;
3. Sejahtera : Terwujudnya masyarakat yang sehat, cerdas dan produktif, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu memainkan peran dan fungsi sebagai subjek dan objek dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka dirumuskan misi pembangunan daerah periode tahun 2019-2024 sebagai berikut:

1. Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang agamis, sehat, cerdas dan berbudaya;
2. Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih;
3. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan serta kemantapan infrastruktur sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan serta fungsi ruang;
4. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal dan industri pertanian serta pariwisata yang berdaya saing disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Dari keempat misi RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019–2024 tersebut, dijabarkan ke dalam 5 (lima) tujuan dan 17 (tujuh belas) sasaran pembangunan daerah, sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya pengamalan nilai-nilai keagamaan dan budaya daerah;
 - b. Meningkatnya harapan hidup masyarakat;
 - c. Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat;
 - d. Menurunnya kemiskinan dan pengangguran;
 - e. Meningkatnya pengendalian jumlah penduduk
2. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta profesionalisme pelayanan publik, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya pelayanan publik yang profesional dan amanah;
 - b. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
3. Meningkatnya penyediaan infrastruktur dasar secara merata dan berkualitas, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas transportasi menuju pusat-pusat perekonomian;
 - b. Meningkatnya kemajuan pembangunan desa;
 - c. Meningkatnya pemenuhan akses layanan air minum dan sanitasi layak dan berkelanjutan;
 - d. Meningkatnya kualitas perumahan, prasarana dan sarana kawasan pemukiman;
 - e. Meningkatnya pengelolaan irigasi, konservasi dan pengendalian banjir
4. Terwujudnya sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
 - b. Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana

5. Meningkatnya perekonomian daerah yang berkualitas dan berdaya saing, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya kualitas ketahanan pangan dan gizi masyarakat;
 - b. Meningkatnya pendapatan masyarakat berbasis potensi lokal;
 - c. Meningkatnya realisasi investasi daerah

Tema pembangunan pada RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023 yaitu **“Peningkatan Pelayanan Publik Pemerataan Pembangunan dan Daya Saing Daerah serta penguatan demokrasi untuk Kesejahteraan Masyarakat”**, dengan fokus pembangunan pada pemulihan perdagangan, pariwisata, investasi, penguatan perlindungan sosial terutama bagi masyarakat miskin dan masyarakat rentan miskin yang terkena dampak ekonomi akibat dampak pandemi COVID-19, pembangunan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, penguatan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan secara berkelanjutan dari pelaksanaan kebijakan pembangunan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, dalam upaya mewujudkan Kabupaten Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera, yang didukung pilar inovasi, kolaborasi, integrasi dan profesionalisme. Untuk mendukung tujuan, sasaran dan tema pembangunan tersebut, strategi pembangunan daerah dituangkan ke dalam delapan Prioritas Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2023, yaitu :

- PPD 1 : Penurunan angka kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja;
- PPD 2 : Peningkatan Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketentraman dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi;
- PPD 3 : Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak;
- PPD 4 : Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata;

- PPD 5 : Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya;
- PPD 6 : Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana;
- PPD 7 : Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur;
- PPD 8 : Peningkatan investasi dan pendapatan daerah.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Garut sebagai Perangkat Daerah yang menjalankan tugas dan fungsi dalam Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar yang dilaksanakan pada tahun 2023 terkait dengan pelaksanaan misi kedua yaitu mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih, dengan tujuan yang terkait Meningkatkan Minat dan Budaya baca serta meningkatkan sadar arsip adalah meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta profesionalisme pelayanan publik, serta meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Adapun prioritas pembangunan daerah yang terkait dengan urusan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah PPD 7 Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur. Perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

Sesuai ketentuan yang tercantum pada Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021, SKPD adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Garut, melaksanakan fungsi peningkatn budaya baca dan kesadaran atentang arsip. Atas dasar pertimbangan hal-hal tersebut, maka dirumuskan Tujuan DISPUSIP Kabupaten Garut sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Garut Nomor 171 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati

Garut Nomor 40 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2019-2024 yaitu:

1. Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik Yang Profesional dan Amanah
2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Tingkat Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan Sasaran jangka menengah SKPD Kabupaten Garut memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsinya serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Atas dasar pertimbangan hal-hal tersebut, maka dirumuskan Sasaran DISPUSIP Kabupaten Garut sebagaimana telah ditetapkan pada Renstra Perubahan DISPUSIP Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Tingkat Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan .
2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
3. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan

Adapun tujuan, sasaran dan indikator Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Garut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 1

Tujuan, sasaran dan indikator kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2023

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
1	Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik dalam urusan Perpustakaan dan Kearsipan	Prosentase akuntabilitas dan kinerja pelayanan DISPUSIP	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja pelayanan DISPUSIP	100%
2	Meningkatkan pengelolaan arsip yang profesional	Prosentase perangkat daerah yang menerapkan standar baku kearsipan	Meningkatnya penerapan standar baku kearsipan	45,4%
3	Meningkatkan pembudayaan kegemaran membaca dan kecerdasan (literasi) masyarakat	Prosentase pemustaka dalam satu tahun	Meningkatnya pembudayaan kegemaran membaca dan kecerdasan (literasi) masyarakat.	8 %

Sumber : Perubahan Renstra 2019-2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, maka penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2023 dikelola melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kementerian Dalam Negeri, dengan rumusan nomenklatur perencanaan dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhirannya sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan untuk selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan KUPA-PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Substansi pada Perubahan Renja Tahun 2023 diantaranya yaitu adanya penyesuaian berupa penambahan atau pengurangan kegiatan/subkegiatan; perubahan pagu program, kegiatan atau subkegiatan, serta perubahan indikator dan target indikator program, kegiatan atau subkegiatan. Perubahan ini dilakukan dalam rangka

menjawab permasalahan dan mendukung pencapaian target sasaran Renstra tahun 2019-2024 melalui prioritas yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renja Tahun 2023. Rekapitulasi rencana program dan kegiatan Perubahan Renja Tahun 2023 disajikan pada tabel 3.2 :

Tabel 3.2
Rekapitulasi Rencana Program dan Kegiatan Perubahan RENJA Tahun 2023

No	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu
1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5	17	42	10.898.958.513
Total		5	17	42	10.898.958.513

Sumber : Hasil Pengolahan data Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023

yang dikelola dalam SIPD.

Secara garis besar rumusan rencana program dan kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Peprustakaan dan Kearsipan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah bidang urusan pemerintahan sebanyak 4 bidang urusan yaitu bidang Pembinaan Peprustakaan, Bidang Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno, Bidang Pengelolaan Arsip dan Bidang Perlindungan dan Penyelamatan arsip
2. Jumlah program sebanyak 5 program, yaitu :
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Program Pembinaan Perpustakaan;
 - c. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno;
 - d. Program Pengelolaan arsip;
 - e. Program Perlindungan dan Penyelamatan arsip
3. Jumlah kegiatan sebanyak 17 kegiatan;
4. Jumlah sub kegiatan sebanyak 42 subkegiatan :
5. Jumlah total kebutuhan dana / pagu indikatif untuk rencana pelaksanaan program dan kegiatan pada Perubahan Renja Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 10.898.958.513,-, dengan kronologis dari pagu indikatif pada Renja Tahun 2023 sebesar Rp. 11.112.659.443,00,- dan pada Perubahan Renja Tahun 2023 kembali mengalami penyesuaian sebesar Rp. 213.700.930,00 menjadi sebesar Rp. 10.898.958.513,-, yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Garut. Adapun rencana program dan kegiatan pada Perubahan Renja Dinas

Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2023 disertai indikator program dan kegiatan serta sumber pendanaan sebagaimana tertuang dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah tersaji pada table berikut:

Tabel. 3.3

Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Garut Tahun 2023

(tabel disesuaikan dengan sipd lama, rkpd p-penetapan)

Unit Organisasi : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Sub Unit Organisasi : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Pagu Indikatif		Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	K e l u a r a n S u b K e g i a t	H a s i l K e g i a t	L o k a s i O u t p u t K e g i a t	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Target Capaian Kinerja		Kebut uhan Dana
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					Tolok Ukur	Target	

2	23	01	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				5.615.351.143,00	5.001.650.213,00		5.615.351.143,00	5.001.650.213,00	Kab.Garut	APBD	5.615.351.143,00	5.001.650.213,00	APBD					
2	23	01	03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah sesuai ketentuan				150.000.000,00	150.000,00		150.000.000,00	150.000.000,00	Kab.Garut	APBD	150.000.000,00	150.000.000,00	APBD					
2	23	01	03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				150.000.000,00	150.000,00		150.000.000,00	150.000.000,00	Kab.Garut	APBD	150.000.000,00	150.000.000,00	APBD					
2	23	01	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Pelaksanaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				27.768.000,00	27.768,00		27.768.000,00	27.768.000,00	Kab.Garut	APBD	27.768.000,00	27.768.000,00	APBD					
2	23	01	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				27.768.000,00	27.768,00		27.768.000,00	27.768.000,00	Kab.Garut	APBD	27.768.000,00	27.768.000,00	APBD					
2	23	01	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran				504.936.590,00	796.841,40		504.936.590,00	796.841.450,00	Kab.Garut	APBD	504.936.590,00	796.841.450,00	APBD					
2	23	01	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10.295.300	30.430,50		10.295.300	30.430.500	Kab.Garut	APBD	10.295.300	30.430.500	APBD					
2	23	01	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (peralatan elektronik , Alih Media dll)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				199.736.240	254.525,900		199.736.240	254.525.900	Kab.Garut	APBD	199.736.240	254.525.900	APBD					
2	23	01	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				11.382.050	11.382,050		11.382.050	11.382.050	Kab.Garut	APBD	11.382.050	11.382.050	APBD					
2	23	01	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				195.511.800	412.491,800		195.511.800	412.491.800	Kab.Garut	APBD	195.511.800	412.491.800	APBD					
2	23	01	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				23.248.200	23.248,200		23.248.200	23.248.200	Kab.Garut	APBD	23.248.200	23.248.200	APBD					
2	23	01	06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				24.123.000	24.123,000		24.123.000	24.123.000	Kab.Garut	APBD	24.123.000	24.123.000	APBD					

2	23	01	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				40.640.000	40.640.000		40.640.000	40.640.000	Kab.Garut	APBD	40.640.000	40.640.000	APBD				
2	23	01	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase pemenuhan kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				400.000.000,00	995.400.000,00		400.000.000,00	995.400.000,00	Kab.Garut	APBD	400.000.000,00	995.400.000,00	APBD				
2	23	01	07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas				-	545.400.000,00		-	545.400.000,00	Kab.Garut	APBD	-	545.400.000,00	APBD				
2	23	01	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				200.000.000,00	200.000.000,00		200.000.000,00	200.000.000,00	Kab.Garut	APBD	200.000.000,00	200.000.000,00	APBD				
2	23	01	07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				200.000.000,00	250.000.000,00		200.000.000,00	250.000.000,00	Kab.Garut	APBD	200.000.000,00	250.000.000,00	APBD				
2	23	01	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran				267.907.500,00	267.907.500,00		267.907.500,00	267.907.500,00	Kab.Garut	APBD	267.907.500,00	267.907.500,00	APBD				
2	23	01	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				84.416.400,00	84.416.400,00		84.416.400,00	84.416.400,00	Kab.Garut	APBD	84.416.400,00	84.416.400,00	APBD				
2	23	01	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				183.491.100,00	183.491.100,00		183.491.100,00	183.491.100,00	Kab.Garut	APBD	183.491.100,00	183.491.100,00	APBD				
2	23	01	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				249.628.900,00	331.628.900,00		249.628.900,00	331.628.900,00	Kab.Garut	APBD	249.628.900,00	326.630.490,00	APBD				
2	23	01	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				30.429.200,00	30.429.200,00		30.429.200,00	30.429.200,00	Kab.Garut	APBD	30.429.200,00	30.429.200,00	APBD				
2	23	01	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				30.104.500,00	30.104.500,00		30.104.500,00	30.104.500,00	Kab.Garut	APBD	30.104.500,00	30.104.500,00	APBD				
2	23	01	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				189.095.200,00	271.095.200,00		189.095.200,00	271.095.200,00	Kab.Garut	APBD	189.095.200,00	266.096.790,00	APBD				

2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Prose				2.553.024.750,00	1.955.589.550,00		2.553.024.750,00	1.955.589.550,00	APBD					
2	23	02	01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					1.976.817.550,00	1.335.412.350,00		1.976.817.550,00	1.335.412.350,00	APBD					
2	23	02	01	06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan				220.938.400,00	220.938.400,00		220.938.400,00	220.938.400,00	APBD					
2	23	02	01	07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Titik Lokasi Layanan				519.924.750,00	563.693.950,00		519.924.750,00	563.693.950,00	APBD					
2	23	02	01	08	Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Perpustakaan				885.954.400,00	200.780.000,00		885.954.400,00	200.780.000,00	APBD					
2	23	02	01	09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan				350.000.000,00	350.000.000,00		350.000.000,00	350.000.000,00	APBD					
2	23	02	02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					576.207.200,00	620.177.200,00		576.207.200,00	620.177.200,00	APBD					
2	23	02	02	01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Prosentase Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota				274.470.000,00	274.470.000,00		274.470.000,00	274.470.000,00	APBD					
2	23	02	02	04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno				301.737.200,00	345.707.200,00		301.737.200,00	345.707.200,00	APBD					
2	23	03			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Prosentase Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				330.495.960,00	330.495.960,00		330.495.960,00	330.495.960,00	APBD					
2	23	03	01		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota					120.964.600,00	120.964.600,00		120.964.600,00	120.964.600,00	APBD					
2	23	03	01	01	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Dilakukan Pengolahan dan Penyiangan				120.964.600,00	120.964.600,00		120.964.600,00	120.964.600,00	APBD					

2	23	03	02		Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					209.531.360,00	209.531.360,00	209.531.360,00	209.531.360,00	Kab.Garut	APBD	209.531.360,00	209.531.360,00	APBD				
2	23	03	02	01	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	Jumlah Koleksi Buku Budaya Etnis Nusantara				111.193.360,00	111.193.360,00	111.193.360,00	111.193.360,00	Kab.Garut	APBD	111.193.360,00	111.193.360,00	APBD				
2	23	03	02	02	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Pengelolaan Buku Entis Nusantara				98.338.000,00	98.338.000,00	98.338.000,00	98.338.000,00	Kab.Garut	APBD	98.338.000,00	98.338.000,00	APBD				
2	24				KEARSIPAN	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan				797.066.600,00	830.195.350,00	797.066.600,00	830.195.350,00	Kab.Garut	APBD	797.066.600,00	830.195.350,00	APBD				
2	24				DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan				797.066.600,00	830.195.350,00	797.066.600,00	830.195.350,00	Kab.Garut	APBD	797.066.600,00	830.195.350,00	APBD				
2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					459.175.200,00	503.113.950,00	459.175.200,00	503.113.950,00	Kab.Garut	APBD	459.175.200,00	503.113.950,00	APBD				
2	24	02	01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis				313.875.500,00	357.814.250,00	313.875.500,00	357.814.250,00	Kab.Garut	APBD	313.875.500,00	357.814.250,00	APBD				
2	24	02	01	01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis				182.711.000,00	226.649.750,00	182.711.000,00	226.649.750,00	Kab.Garut	APBD	182.711.000,00	226.649.750,00	APBD				
2	24	02	01	02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Arsi yanag terpelihara				131.164.500,00	131.164.500,00	131.164.500,00	131.164.500,00	Kab.Garut	APBD	131.164.500,00	131.164.500,00	APBD				
2	24	02	02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah arsip yang akan dilakukan penilaian, penetapan dan pelaksanaan pemusnahan arsip yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun				145.299.700,00	145.299.700,00	145.299.700,00	145.299.700,00	Kab.Garut	APBD	145.299.700,00	145.299.700,00	APBD				
2	24	02	02	02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip terakuisisi				145.299.700,00	145.299.700,00	145.299.700,00	145.299.700,00	Kab.Garut	APBD	145.299.700,00	145.299.700,00	APBD				
2	24	03			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					337.891.400,00	327.081.400,00	337.891.400,00	327.081.400,00	Kab.Garut	APBD	337.891.400,00	327.081.400,00	APBD				

2	24	03	01		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Prosentase Pemusnahan Arsip di SKPD				151.155.500,00	140.345.500,00		151.155.500,00	140.345.500,00	Kab.Garut	APBD	151.155.500,00	140.345.500,00	APBD				
2	24	03	01	01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	Jumlah daftar autentisitas arsip sesuai persyaratan penjaminan keabsahan arsip yang dinilai dan ditetapkan				151.155.500,00	140.345.500,00		151.155.500,00	140.345.500,00	Kab.Garut	APBD	151.155.500,00	140.345.500,00	APBD				
2	24	03	02		Perlindungan dan Penyelamatan arsip akibat Bencana yang berskala Kabupaten/Kota	Presentase Jumlah Arsip yang terselamatkan									Kab.Garut	APBD			APBD				
2	24	03	02	01	Evaluasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Jumlah arsip yang dilakukan evakuasi, identifikasi, pemulihan arsip akibat bencana									Kab.Garut	APBD			APBD				
2	24	03	05		Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang					186.735.900,00	186.735.900,00		186.735.900,00	186.735.900,00	Kab.Garut	APBD	186.735.900,00	186.735.900,00	APBD				
2	24	03	05	03	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang dilakukan penetapan dan pengumuman				186.735.900,00	186.735.900,00		186.735.900,00	186.735.900,00	Kab.Garut	APBD	186.735.900,00	186.735.900,00	APBD				
Jumlah																	11.112.659.443	10.898.958.513					

Sumber : RKPD Perubahan, SIPD 2023

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Penyusunan Renja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan mengacu Pada RKPD Tahun 2023 yang merupakan tahun keempat dari Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2019-2024 serta pedoman dalam menyusun kebijakan publik, baik yang berupa kerangka regulasi maupun kerangka anggaran. Dalam Hal Ini Menjadi Dasar Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS, Serta Rancangan APBD Tahun 2023.

Dalam rangka pencapaian sasaran program-program yang direncanakan dalam Renja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik diantaranya kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan peran/tanggung jawab/tugas yang melekat pada masing-masing perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, setiap perangkat daerah melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala 3 (tiga) bulanan atau triwulanan kepada bappeda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kaidah pelaksanaan yang perlu diperhatikan dalam implementasi rencana kerja selain menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya, baik dalam "kerangka regulasi" maupun dalam "kerangka anggaran" (budget intervention), penting untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dengan tetap memperhatikan peran/ tanggung jawab/tugas yang melekat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pada akhir tahun anggaran 2023, Dinas perpustakaan dan Kearsipan melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan maupun kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan-peraturan lainnya.

Rencana tindak lanjut yang perlu dilaksanakan setelah ditetapkannya Rencana Kerja ini adalah dilaksanakannya penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Garut Tahun 2023.

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN